

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Pengertian anak menurut Undang-undang Sistem peradilan pidana anak No.

11 Tahun 2012:

*Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peranan strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Selanjutnya pengertian anak nakal itu sendiri menurut UU No. 3 Tahun 1997

Tentang Pengadilan Anak:

*Anak nakal adalah :*

- a). Anak yang melakukan tindak pidana; atau*
- b). Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut Peraturan Perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.*

Pemberian pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal telah diatur

Menurut pasal 23 UU No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pidana yang berbunyi:

*(1). Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan*

*(2). Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:*

- a. Pidana penjara;*
- b. Pidana kurungan;*
- c. Pidana denda; atau*
- d. Pidana pengawasan.*

*(3). Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak nakal juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan Barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.*

*(4). Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.*

Anak nakal dalam hal ini dapat dipidana penjara tetapi haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku seperti Menurut pasal 26 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang berbunyi:

*(1). Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.*

*(2). Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.*

*(3). Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b.*

*(4). Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.*

Selanjutnya istilah Pengertian anak nakal itu sendiri didalam UU No. 11 tahun 2012 tidak ada melainkan disebut dengan istilah Anak yang berhadapan dengan Hukum serta Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak. Menurut pasal 1 (satu) pengertian:

*Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana sedangkan pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*

Anak yang berhadapan dengan hukum tidak sembarangan dapat diajukan ke sidang pengadilan, terdapat batas umur untuk anak yang dapat diajukan ke sidang pengadilan, berikut batas usia anak yang dapat diajukan sidang menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang terdapat dalam Pasal 4 (empat) berbunyi sebagai berikut : (1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah Sekurang-kurangnya 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

(2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang Anak.

Sedangkan batas usia anak yang dapat diajukan sidang menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut :

*“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak.”*

1. Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana menurut UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak :

Sebelumnya Anak dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dibagi menjadi beberapa yaitu Anak didik pemsyarakatan, Balai pemsyarakatan, Tim pengamat pemsyarakatan, dan klien pemsyarakatan adalah anak didik pemsyarakatan, Balai pemsyarakatan, Tim pengamat pemsyarakatan, dan klien pemsyarakatan sebagaimana dimaksud dalam UU

No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Selanjutnya dalam proses persidangan menurut pasal 6 (enam) Hakim, penuntut umum, penyidik, dan penasihat hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas dengan tujuan supaya menciptakan suasana kekeluargaan serta agar tidak tercipta suasana yang mencekam bagi anak sehingga dikuatirkan anak tidak berani memberikan kesaksian sebagai korban maupun sebagai pelaku. Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum Menurut peraturan yang terdapat dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak menurut Pasal 51 disebutkan bahwa :

- (1) *setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.*
- (2) *Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*
- (3) *Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.*

Pasal 52 : *Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1), Penasihat Hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.*<sup>1</sup>

2. Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak :

Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dibagi menjadi hak anak yang dalam proses peradilan pidana dan hak anak yang sedang menjalani masa pidana, Hak-

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak

hak anak dalam proses peradilan pidana menurut Peraturan perundang-undangan

No. 11 tahun 2012 tentang pengadilan anak Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

- a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;*
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;*
- c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif;*
- d) Melakukan kegiatan rekreasional;*
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;*
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;*
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;*
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;*
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya;*
- j) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;*
- k) Memperoleh advokasi sosial;*
- l) Memperoleh kehidupan pribadi;*
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;*
- n) Memperoleh pendidikan;*
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan*
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Hak-hak anak menurut Pasal (4) yang menjalani masa pidana berhak untuk :

- a) Mendapat pengurangan masa pidana;*
- b) Memperoleh asimilasi;*
- c) Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;*
- d) Memperoleh pembebasan bersyarat;*
- e) Memperoleh cuti menjelang bebas;*
- f) Memperoleh cuti bersyarat; dan*
- g) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.*

Menurut Pasal 5 :

- 1) *Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif*
- 2) *Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a) *Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;*
  - b) *Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan*
  - c) *Pembinaan, pmbimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.*
- 3) *Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf A dan huruf b wajib diupayakan Diversi*

**B. Proses Pemeriksaan Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum No. Perkara 467/Pid.Sus/2013/PN.Dps. Dan No. Perkara 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN Dps Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

**1. Proses Pemeriksaan Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum No. Perkara 467/Pid.Sus/2013/PN.Dps. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

Analisis putusan hakim dengan No. Perkara 467/Pid.Sus/2013/PN.Dps.

Perkara dalam putusan Hakim ini adalah Pencurian yang dilakukan oleh Anak X(identitas disembunyikan). Adapun kronologis ringkasnya dari perkara tersebut sebagai berikut bahwa X melakukan pencurian 4 (empat) slop rokok malboro merah; 4 (empat) bungkus rokok malboro merah; 2 (dua) slop malboro putih; 1 (satu) slop malboro light mentol; 2 (dua) slop rokok dunhil putih; 4 (empat) bungkus rokok dunhil putih; 3 (tiga) slop sampoerna Mild.disebuah warung milik saksi Ni Ketut Suandewi yang terletak di Jl.Gunung Andakasa Gang Dasayanama No. 1 Padangsambian Denpasar. Peristiwa terjadi pada hari selasa tanggal 7 mei 2013 sekira jam 23:55 Wita. Kerugian yang diderita Saksi korban sebesar kurang lebih Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perkara tersebut dilaporkan oleh saksi korban pada tanggal 7 mei 2013 oleh pemilik warung, karena pelaku tertangkap tangan oleh saksi Ni Ketut Suandewi (pemilik warung); saksi, I Ketut Srinadi; Saksi , I Gede Wahyu Perdana Putra (Anak pemilik warung) kemudian hasil laporan tersebut ditindak lanjuti ke proses pemeriksaan perkara pidana.

**a. Penyelidikan**

Pada tahap penyidikan ini polisi mendapat laporan dari saksi Ni Ketut Suandewi selanjutnya di TKP barang bukti yang diketemukan diantaranya obeng diakui milik X, 4 (empat) slop dan 4 (empat) bungkus rokok malboro merah, 2 (dua) slop malboro putih, 1 (satu) slop malboro light mentol, 2 (dua) slop dan 4 (empat) bungkus rokok dunhill putih, 3 (tiga) slop sampoerna mild;

**b. Penyidikan**

Pada tahap penyidikan ini diketemukan Barang bukti yang berupa obeng yang diakui milik terdakwa, 4 (empat) slop dan 4 (empat) bungkus rokok malboro merah, 2 (dua) slop malboro putih, 1 (satu) slop malboro light mentol, 2 (dua) slop dan 4 (empat) bungkus rokok dunhill putih, 3 (tiga) slop sampoerna mild; dan dari keterangan Saksi Ni Ketut Suandewi bahwa terdakwa pernah bekerja ditempat saksi sekarang sudah keluar; bahwa diwarung saksi dalm keadaan terkunci telah kehilangan barang seperti barang bukti tersebut, Bahwa saksi tahu pada malam itu saksi mendengar suara kletek-kletek diwarung dimana kamar tidur dengan warung dekat lalu saksi bangun diketemukan terdakwa ngumpet dibalik sumur oleh anak saksi bertiga; Saksi, I Ketut Srinadi bahwa saksi yang melakukan penangkapan atas diri terdakwa, pada tanggal 7 mei 2013 karena kedapatan melakukan pencurian di rumah, Ni

Ketut Suandewi, di jalan Andakasa, Penamparan, Padangsambian Denpasar, sekitar jam 23:30 Wita; Saksi, I Gede Wahyu Perrdana Putra, Bahwa orang tua saksi telah kehilangan barang, pada hari selasa, tanggal 7 mei 2013, sekira jam 23:55 Wita pelaku mengambil barang dengan cara terlebih dahulu memanjat tembok pekarangan rumah kemudian membuka baut kunci gembok pintu warung.

### c. Penuntutan

Pada tahap penuntutan ini terdakwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana daitur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3,5 KUHP jo. yang berbunyi :

*3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)*

*5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*

Kemudian pada pasal 26 UU No. 3 tahun 1997 menjelaskan bahwa pidan penjara bagi anak nakal adalah  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa sedangkan pada pasal 363 KUHP ancaman pidana penjara 7 tahun. Berarti terdakwa diancam dengan hukuman pidana penjara  $\frac{1}{2}$  dari 7 tahun yaitu  $\frac{3}{5}$  tahun.



#### **d. Persidangan**

Kasus Dengan No. Perkara 467/Pid.Sus/2013/PN.Dps. dengan terdakwa X (identitas dirahasiakan) diproses melalui peradilan Pidana karena Terdakwa anak dilihat dari usia sudah mencapai umur 16 (enam belas) Tahun dan menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sudah sesuai karena menurut Pasal 4 Ayat 1 (satu) yang berbunyi sebagai berikut:

*(1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah*

*Sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 . (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.*

Pada kasus ini dalam setiap tingkat pemeriksaan proses peradilan pidana tidak dilakukan penyelesaian secara Diversi karena dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak belum diatur mengenai penyelesaian secara Diversi. Perkara terhadap Anak nakal di dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, hanya mengatur mengenai pidana pokok, pidana tambahan; dan tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap Anak Nakal. yang seperti pada pasal 22 menyatakan bahwa: *pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.*

Dilihat dari aspek perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Anak tersebut Hakim menghukum terdakwa dengan Hukuman Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 12 (dua belas) hari. Menurut penulis sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut telah sesuai dengan Pasal 363 ayat 1 ke-3, 5 KUHP jo. UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak.

Pasal 363 ayat 1 yaitu:

- (1) Diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun:
  3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
  5. Pencurian dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Unsur-unsur tindak pidana pada pasal 363 KUHP

1. Barang siapa : termasuk pada unsur Subyektif

Bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum”.

2. Mengambil sesuatu barang : termasuk pada unsur objektif

4 (empat) slop rokok malboro merah;

4 (empat) bungkus rokok malboro merah;

2 (dua) slop mlboro putih;

1 (satu) slop malboro lights mentol;

2 (dua) slop rokok dunhill putih;

4 (empat) bungkus rokok dunhill putih;

3 (tiga) slop sampoerna mild;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain : termasuk pada unsur objektif

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa mengambil barang yang ada di warung milik saksi korban Ni Ketut Suandewi

4. Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum : termasuk pada unsur objektif

Terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan tanpa izin dari pemiliknya, ini dibuktikan rokok telah dijual oleh terdakwa untuk membayar kos, maen judi dan sisanya untuk beli hp.

5. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak : termasuk pada unsur objektif

Terdakwa pada hari selasa tanggal 7 Mei 2013 sekitar jam 23.55 WITA atau pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalm tahun 2013.

6. Pencurian dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu : termasuk pada unsur objektif

Terdakwa untuk melakukan pencurian ditempat tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban Ni Ketut Suandewi dengan cara memanjat tembok pekarangan rumah saksi korban Ni Ketut Suandewi keuadian Terdakwa membuka baut kunci gembok warung yang ada dalam pekarangan rumah saksi korban Ni Ketut Suandewi dengan menggunakan satu buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Selanjutnya dilihat dari Aspek pertanggung jawab pidana bahwa terdakwa Anak masih dibawah umur yang jelas pertanggung jawaban pidannya berbeda dengan orang dewasa. Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak disebutkan pada pasal 26 ayat 1 yaitu:

*Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.*

Diliat dari subyeknya dalm UU No.3 tahun 1997 bahwa terdakwa ialah masih dibawah umur atau masuk dalam kategori Anak Nakal, yang dimaksud anak nakal ialah Pasal 1 (satu) Angka 2 (dua) UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak yang berbunyi:

*Anak Nakal adalah : Anak yang melakukan tindak pidana;atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut Peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.*

Selanjutnya dilihat Dalam Delik Dolus (kesengajaan) dan delik culpa (kealpaan) terdakwa lebih kearah delik Dolus (kesengajaan) yaitu adanya kesalahan yang dilakukan terdakwa yang berupa kesengajaan bahwa terdakwa ketika melewati rumah saksi korban Ni Ketut Suandewi timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian ditempat tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban Ni Ketut Suandewi kemudian terdakwa membuka baut kunci gembok warung yang ada dalam pekarangan rumah saksi Ni Ketut Suandewi dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga pintu warung berhasil dibuka.

. Dan selanjutnya proses anak yang berhadapan dengan hukum pada sidang di pengadilan menurut UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak sebagai berikut :

**a. Hakim, penuntut umum dan penasihat hukum tidak memakai toga**

Pasal 6 menyatakan : “*Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.*”

Untuk pemeriksaan perkara anak nakal, para pejabat yang disebutkan dalam Pasal 6 (enam) tidak boleh memakai toga, termasuk panitera yang membantu hakim tidak memakai jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, hal ini dimaksudkan agar dalam persidangan tidak menimbulkan kesan menakutkan atau menyeramkan terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan dengan lancar dan penuh kekeluargaan.<sup>2</sup>

**b. Disidangkan dengan hakim tunggal**

Pada prinsipnya pemeriksaan di pengadilan dilakukan dengan hakim majelis, namun pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal (pasal 11 ayat (1) UU pengadilan Anak). Dengan hakim tunggal, bertujuan agar sidang anak dapat diselesaikan dengan cepat.<sup>3</sup> Memang pada prinsipnya bahwa penyelesaian perkara anak dapat dilakukan dengan waktu singkat/cepat agar anak tidak berlama-lama mendapat perlakuan terkait pemberian sanksi terhadap kenakalan yang telah dilakukannya.<sup>4</sup> Perkara

---

<sup>2</sup> Nashriana, *perlindungan Hukum pidana bagi anak di indonesia*, Raja Grafindo persada, jakarta : 2001, hlm.140.

<sup>3</sup> Gatot supramono, *Surat dakwaan dan putusan hakim, yang batal demi hukum*, Djambatan, Jakarta :1991, hal.61.

<sup>4</sup> Nashriana, *Op.Cit.*, hlm.101.

anak yang disidangkan dengan hakim tunggal adalah Perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya lima tahun kebawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit, maka berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) UU pengadilan anak, perkara tersebut diperiksa dengan hakim majelis.

Pengaturan dengan hakim tunggal dalam UU Pengadilan anak berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman (yang kini diubah melalui Undang-undang No. 35 tahun 1999). Dalam Pasal 15 Ayat (1) disebutkan bahwa, “Semua pengadilan memeriksa dan memutuskan dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali apabila UU menentukan lain . “kecuali disini membuka kemungkinan untuk pemeriksaan oleh hakim tunggal. Ditingkat banding maupun ditingkat kasasi, hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak nakal sama dengan ditingkat Pengadilan Negeri, yaitu dengan hakim tunggal (pasal 14 dan pasal 18 UU Pengadilan Anak).<sup>5</sup>

#### **c. Pemeriksaan Perkara Anak dilakukan dalam sidang tertutup**

Dalam penjelasan Pasal 8 UU pengadilan Anak disebutkan bahwa pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup dan wajib dihadiri orang tua, Wali atau orang tua asuh berdasarkan pertimbangan agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan segala perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan. Kemudian digunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuhnya dimaksudkan agar identitas anak dan keluarganya tidak menjadi berita umum yang akan lebih

---

<sup>5</sup> Nashriana, *Op.Cit* , hlm.142.

menekankan perasaan serta mengganggu kesehatan mental anak.<sup>6</sup> Dalam persidangan anak penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir seperti bunyi pada Pasal 55 yaitu:

*Dalam perkara anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2, penuntut umum, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam sidang anak.*

#### **d. Laporan pembimbing Kemasyarakatan**

Sesuai Pasal 56 UU Pengadilan Anak, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) mengenai anak yang bersangkutan. Ini berarti pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporannya secara tertulis dan kelak bila diperlukan pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan kesaksian di depan pengadilan Anak. Pembimbing kemasyarakatan yang dimaksud adalah pembimbing kemasyarakatan pada balai kemasyarakatan di wilayah hukum pengadilan negeri setempat. Apabila di wilayah hukum pengadilan negeri tidak terdapat balai kemasyarakatan kemasyarakatan, maka menurut pasal 12 ayat (2) keputusan menteri kehakiman No.M.02 PW.07.10 TAHUN 1997, Hakim dapat memerintahkan pembimbing kemasyarakatan dari anak yang bersangkutan untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan pada balai kemasyarakatan terdekat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wagianti soetedjo, *Hukum pidana anak*, Refika Aditama, Bandung : 2006, hlm.11.

<sup>7</sup> *Ibid.* 37.

**e. Pembukaan sidang anak (terdakwa didampingi orang tua, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan)**

Sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal 57 Ayat (1) berbunyi :

*Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. dan menurut pasal 57 ayat (2) : Selama persidangan, terdakwa didampingi orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan.*

Menurut praktik, hakim lalu memeriksa identitas terdakwa, setelah itu hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Setelah itu, terdakwa atau penasihat hukum diberi kesempatan untuk mengajukan tangkisan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum.<sup>8</sup>

**f. Pemeriksaan saksi**

Pada dasarnya setiap saksi didengar dipersidangan dihadiri oleh terdakwa, dengan maksud agar terdakwa mengetahui apa yang diterangkan oleh saksi dalam mengungkapkan terjadinya peristiwa pidana dimana terdakwa yang di dakwa sebagai pelakunya. Sehubungan dengan itu, terdakwa mempunyai kesempatan untuk menyanggah keterangan saksi tentang hal-hal yang tidak benar dari keterangan itu. Orang yang diajukan sebagai saksi, terutama diambil dari orang-orang yang kebetulan berada disekitar tempat kejadian, dengan tujuan agar mereka mudah mengungkapkan jalanya peristiwa pidana. Sebelum memberikan keterangan di persidangan, saksi diwajibkan mengangkat sumpah terlebih dahulu, bahwa ia akan menerangkan dengan benar dari apa yang dilihat dan didengar atau dialami sendiri. Apabila saksi tidak menerangkan dengan

---

<sup>8</sup> Nashriana, *Loc. Cit, hlm. 146.*



benar dan telah diperingatkan oleh hakim yang memimpin sidang pengadilan, tetapi ternyata saksi tetap pada keterangannya, maka berdasarkan pasal 174 ayat (2) KUHAP hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, dapat memerintahkan supaya saksi tersebut ditahan dan selanjutnya dituntut dengan dakwaan sumpah palsu. Saksi yang demikian dapat dipidana berdasarkan pasal 242 KUHP.<sup>9</sup> Tetapi untuk perkara anak pemeriksaan saksi boleh tidak dihadiri oleh terdakwa seperti Menurut pasal 58 ayat (1) UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak berbunyi:

*Pada waktu memeriksa saksi, Hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang dan menurut ayat (2) Pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.<sup>10</sup>*

#### **g. Putusan Hakim**

Putusan hakim diatur dalam UU No. 3 tahun 1997 pasal 59 yang berbunyi :

- (1) Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua wali, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak*
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan*
- (3) Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*

---

<sup>9</sup> *Ibid.* 147.

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

**2. Proses Pemeriksaan Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum No. Perkara 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN Dps. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Analisis putusan Hakim dengan No. Perkara 3/pid.Sus. Anak/2014 /PN Dps

Perkara dalam putusan hakim ini adalah Mengenai penggunaan obat-obatan terlarang berjenis narkotika yang dilakukan oleh Anak X (identitas disembuyikan). Adapun kronologis ringkas dari perkara tersebut sebagai berikut bahwa X pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Badung (wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang pada awalnya X datang kerumah IPDY ALIAS K dan X diajak untuk membeli shabu dengan cara patungan masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya IPDY ALIAS K memesan shabu kepada S (DPO) melalui telepon, lalu IPDY ALIAS K bertemu S (DPO) di dekat lampu merah Jl. Raya Lukluk Mengwi dan menyerahkan uang kepada S (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kembali kerumah, 10 menit kemudian IPDY ALIAS K ditelfon kembali oleh S (DPO) untuk mengambil shabu yang dipesannya di Jl. Ahmad Yani Denpasar setelah mendapatkan Shabu tersebut IPDY ALIAS K pulang bersama X. Sesampai di rumah IPDY ALIAS K dibagi menjadi dua bagian dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram diberikan terdakwa untuk dikonsumsi bersama-sama sedangkan satu bagian lagi dengan berat 0.13 (nol koma tiga belas) gram oleh IPDY ALIAS K disimpan dalam potongan koran dan diletakkan di atas salon speaker sdi dalam kamar tidur IPDY ALIAS K,

namun sebelum shabu tersebut dikonsumsi datang pihak kepolisian dan melakukan penangkapan dan pengeledahan.

Analisis kasus pada putusan No. 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN Dps hakim menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa anak dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan yang dalam hal ini Hakim memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, UU No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana anak. Dan dalam kasus ini proses Diversi pernah diupayakan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena menurut pertimbangan Hakim di dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan hal ini telah sesuai dengan UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam pasal 13 yang berbunyi :

*Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:*

- a. *Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau*
- b. *Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.*

#### **a. Penyelidikan**

Tahap penyelidikan ini pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang dipanggil ANGGA sering menggunakan narkoba jenis shabu di daerah Ahmad Yani Denpasar Barat, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi MDF dan IWSD melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 sekitar pukul 21.00 wita saksi diamankan seorang laki-laki di Badung, dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa, dari diri terdakwa ditemukan 1

(satu) kertas timah rokok didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas )gram yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan dan dibawa ke Sat Narkoba Polresta Denpasar untuk Penyidikan lebih lanjut.

#### **b. Penyidikan**

Tahap penyidikan ini Bahwa Terdakwa Anak mendapatkan barang berupa 1 (satu) kertas timah rokok didalamnya berisi (satu) plastik klip yang berisis kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram tersebut dibeli dari dari S (DPO) dengan cara patungan kepada IPDY alias K (terdakwa dalam berkas terpisah) masing-masing sebesar RP.250.000 (dua ratus lima puluh ribu)

#### **c. Penuntutan**

Pada Tahap penuntutan pada terdakwa Anak, tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

*(1) Setiap penyalah guna*

*a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.*

Tuntutan selanjutnya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

#### **d. Persidangan**

Kasus dengan No. Perkara 3/Pid.Sus.Anak/2014/PN Dps dengan terdakwa bernama Terdakwa Anak (identitas dirahasiakan) diproses melalui peradilan pidana karena anak diliat dari usia sudah mencapai usia 17 Tahun dan menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sudah sesuai pada ketentuan pasal 1 (satu) angka (3) yang berbunyi sebagai berikut: Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada kasus ini dalam setiap tingkat pemeriksaan proses peradilan pidana dilakukan penyelesaian secara Diversi. Pengupayaan penyelesaian secara Diversi itu dilakukan pada tingkat persidangan, pembelaan terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa anak adalah korban penyalahgunaan narkotika;
2. Mengembalikan anak kepada orang tuanya dengan syarat agar anak tersebut dilakukan rehabilitasi dan mendapatkan pengaeasan untuk jangka waktu tertentu demi menjaga harkat dan martabat anak;
3. Tidak menjatuhkan pidana penjara karena tidak ditemukan unsur membahayakan bagi masyarakat, dan untuk melindungi anak dari pengaruh lingkungan dipenjara mengingat narkotika yang diperoleh justru berasal dari seseorang di dalam lapas.

Tetapi proses pelaksanaan Diversi itu tidak terlaksana karena terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga hakim dengan dakwaan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 yang berbunyi:

*(1) Setiap penyalah guna :*

*a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun"*

, yang Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna :
2. Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap penyalah guna, yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya, dan fakta-fakta di persidangan terdakwa anak ditanya oleh hakim mengenai identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan dijawab benar oleh terdakwa dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan

Narkotika tanpa hak dan melawan hukum ; yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika haruslah terdakwa mendapat ijin dan Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan, Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dalam dakwaan kedua yaitu setiap penyalah guna telah terpenuhi adanya;

#### Ad.2 Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika sebagaimana disebutkan didalam pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesi maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Bahwa terdakwa mengenal narkotika berupa shabu dari IPDY alias K dimana awalnya terdakwa tidak pernah mengenal shabu tersebut, namun setelah itu, K dan terdakwa telah membeli shabu sebanyak 4 kali yang akan dipakai bersama namun pada pembelian terakhir terdakwa dan IPDY alias K ditangkap dimana saat itu terdakwa memiliki shabu seberat 0,11 gram dimana shabu tersebut akan dipakai bersama K namun sebelum dipakai terdakwa dan K sudah ditangkap polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa oleh krena semua unsur dari pasal 127 ayat 91) huruf a telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ; perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat



terlarang ; perbuatan terdakwa membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda bangsa indonesia ;

Keadaan yang meringankan ; terdakwa mengaku bersalah dan menyesal; terdakwa belum pernah di hukum.

Selanjutnya dilihat dari aspek perbuatan putusan Hakim dalam bentuk pidana penjara terhadap terdakwa anak selama 9 (sembilan) bulan. Lalu menurut penulis sangsi yang diberikan terhadap terdakwa tersebut telah sesuai karena hakim menolak upaya Diversi tersebut dan menurut pasal 13 UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak berbunyi:

*Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:*

- a. Proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau*
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.*

Dilihat dari perbuatan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1 ayat 2 (dua) UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak yang berbunyi :

*“ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (dlapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*

Selanjutnya dari aspek pertanggung jawaban pidana bahwa terdakwa memenuhi unsur yang secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri. Pertanggung jawaban pidana menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan bahwa terdakwa telah memenuhi usia

yang dipersyaratkan dalam sistem peradilan pidana anak, yakni usia terdakwa anak 17 (tujuh belas) dan terdakwa berakal sehat.

Dari aspek dolus (kesengajaan) dan culpa (kealpaan) terdakwa memenuhi unsur dolus (kesengajaan) bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

Selanjutnya Proses pemeriksaan terhadap anak berhadapan dengan hukum menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang pertama melalui proses :

**a. Penyelesaian melalui jalur Diversi (non litigasi)**

Penyelesaian melalui jalur Diversi Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sudah jelas diatur dalam pasal 5 ayat (3) yang berbunyi:

*Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi, dan selanjutnya Menurut pasal 52 ayat (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim, Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.*

Penyelesaian melalui Jalur Diversi harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang sudah diatur dalam pasal 5 ayat (1). Keadilan restoratif itu sendiri menurut pengertian dalam pasal 1 angka (6) berbunyi:

*Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.*

Diversi itu sendiri bertujuan sebagaimana diatur dalam pasal 6 :

- a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

- c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Diversi mempunyai ketentuan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- a) Syarat-syarat pelaksanaan Diversi menurut pasal 7 huruf a dan b yaitu sebagai berikut :

*Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.*

- b) menurut pasal 9 angka (1) mengatur huruf a, b, c; dan d. sebagai berikut : *Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan : kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. serta angka (2) huruf a, b, c; dan d. Berbunyi sebagai berikut : kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk : Tindakan pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.*
- c) Diversi dapat dilaksanakan paling lama 30 hari sesuai dengan ketentuan

pada pasal 52 ayat (3) yang berbunyi :

*Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.*

Proses Pelaksanaan diversi itu sendiri diatur dalam pasal 52 ayat (4) :

*Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang sidang mediasi pengadilan negeri. Dan tata cara pelaksanaan Diversi diatur dalam pasal 8 yang berbunyi : Pasal (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.*

*Pasal (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/ atau masyarakat.*

*Pasal (3) Proses Diversi wajib memperhatikan :*

- a) Kepentingan korban;
- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c) Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan

*f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.*

d) Hasil kesepakatan apabila Diversi terwujud menurut pasal 12 yaitu :

- 1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- 2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3(tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- 3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- 4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- 5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Adapun bentuk hasil kesepakatan Diversi menurut pasal 11 huruf a, b, c, d.

yaitu :

- a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d) pelayanan masyarakat.

e). Pengawasan proses Diversi diatur dalam pasal 14 yang berbunyi :

- 1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- 2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- 3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak

**b. Penyelesaian melalui jalur pengadilan (Litigasi)**

1). Dalam tahap ini dilakukan apabila sebelumnya dengan jalur Diversi tidak dapat dilaksanakan seperti pada peraturan perundang-undangan No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 52 ayat (6) yang berbunyi : *Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.* Selanjutnya ketentuan pemeriksaan anak dimuka pengadilan diatur dalam pasal 53 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi :

1) *Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus anak;*

2) *Ruang tunggu sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang Dewasa;*

3) *Waktu sidang anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.*

2) Selanjutnya menurut pasal 44 ayat (1), (2), (3) pemeriksaan anak di muka pengadilan :

*Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal; ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih sulit pembuktiannya; Dalam setiap persidangan hakim dibantu oleh seorang penitera atau penitera pengganti.*

3) *Sidang tertutup untuk umum seperti pada pasal 54 yang berbunyi sebagai berikut : Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.*

4) *Terdakwa didampingi orang tua/wali atau pendamping seperti peraturan pada pasal 55 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi :*

*Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing*

*kemasyarakatan untuk mendampingi anak; Dalam hal orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan; Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang anak batal demi hukum.*

5) Tahap Pembukaan sidang diatur dalam pasal 56 yang berbunyi :

*Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan.*

6) Pembacaan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang diatur dalam pasal 57 :

*Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain.*

Yang dimaksud laporan itu sendiri ialah menurut pasal 57 ayat (2) berisi :

- a) Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial,*
- b) latar belakang dilakukannya tindak pidana;*
- c) Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;*
- d) Hal lain yang dianggap perlu;*
- e) Berita acara Diversi; dan*
- f) Kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan*

7) Tahap pemeriksaan Anak korban dan/atau Anak saksi diatur dalam pasal 58 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi:

*Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruang sidang; Pada saat pemeriksaan anak korban dan/atau anak saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir; Dalam hal anak korban dan/atau anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban dan/atau anak saksi di dengar keterangannya:*

- a) Diluar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat*

*dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, atau*

*b) Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.*

#### 8) Putusan hakim

Dalam pasal 60 menyebutkan sebagai berikut :

*1) Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.*

*2) Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.*

*3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.*

*4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum.<sup>12</sup>*

---

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak